

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DI KOTA MEDAN

Mutiara Sari Lubis¹⁾, Irsyad Lubis²⁾

¹Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara

² Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara

Corresponding email: Mutiarasarilubis@gmail.com

ABSTRACT

Since 2015 the local government of Medan City has determined that poverty alleviation and community empowerment efforts become one of the regional priority programs. This program is contained in Medan City Regulation No. 5 of 2015. This study aims to determine the role of the City Government in poverty reduction through the Skills Improvement program in Medan and the factors that influence it. To achieve these objectives, qualitative research methods are used to decipher data descriptively. Data collection techniques are done by observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed: First, the role of the government in empowering the poor through the Skills Improvement program can be broadly categorized into two roles, namely the growth of the business climate and the strengthening of business potential or power. The growth of the business climate includes funding, facilities & infrastructure, business information, business licensing and trade promotions. While Strengthening Potential or Power covers production and processing, marketing, and human resources. Second, the factors that influence the empowerment of the poor through the Skills Improvement program in Medan include inhibiting and supporting factors. The inhibiting factor is the lack of innovation in marketing and the limited budget which is only a few percent, while the supporting factors are human resources and abundant natural resources.

Key word: *Poverty Alleviation, Programs, Skills Improvement*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusnya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di Negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemudian pemerintah mengupayakan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dimana ada empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu : Menyempurnakan program perlindungan sosial, Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh rakyat dan pemerintah, dengan rakyat sebagai aktor yang vital perannya untuk pembangunan atau disebut pelaku utama pembangunan.

Di Kota Medan, Masalah Kemiskinan merupakan hal yang perlu untuk di atasi. Berdasarkan data dari susenas, kemiskinan di Kota Medan dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Berikut disajikan secara lengkap jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2012-2016 dalam tabel.

Jumlah masyarakat miskin di Kota Medan periode Tahun 2012- 2016, dengan memperhatikan serta menyimak secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Medan boleh dikatakan hampir tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan membandingkan angka persentase penduduk miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada Tahun 2012 dan Tahun 2016, boleh dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 2012 menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2016. Hal ini tentu merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pengetasan kemiskinan di wilayah Kota Medan baik program yang menyentuh langsung rumah tangga penerima manfaat maupun program percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Sejak tahun 2015 pemerintah daerah Kota Medan telah menetapkan upaya pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program prioritas daerah. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015.

Berangkat dari masalah diatas, salah satu Program Pemerintah dalam pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yakni melalui program Peningkatan Keterampilan. Adapun program ini awalnya dibawah langsung oleh Dinas Koperindag namun pada tahun 2017 Dinas Koperindag terbagi menjadi 3 dinas yaitu Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Kemudian diambil alih oleh Dinas

Perindustrian namun tetap ada kordinasi antara Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan beberapa lembaga-lembaga pemerintah kota lainnya.

Peningkatan Keterampilan disini termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu kegiatan peningkatan keterampilan adalah kegiatan home industri atau rumah usaha produk atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian, "**Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Peningkatan Keterampilan di kota Medan**".

TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan sebagai berikut, yaitu : Desentralisasi, Tugas pembantuan, Secara formal, Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. Ellis (1984:242-245), misalnya, menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan social- psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat

didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Pemberdayaan

Wuradji dalam bukunya „Metodologi Pengembangan masyarakat. hal.3. mengatakan bahwa :“pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan”. Dan masih banyak pendapat lain tentang pengertian pemberdayaan ini, diantaranya: Priyono dan Pranaka, dalam bukunya Priyono, Onny dan Pranaka, A.M.W, Hikmat, R. Harry dan Mubyarto, dalam bukunya, Sun’an, Muammil & Abdurrahman Senuk. Ekonomi Pembangunan Daerah.

Program Peningkatan Keterampilan

Home Industri

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industri (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

Pelaku Home Industri

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri

ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Lagi, jumlah penduduk miskinpun akan berangsur menurun.

Pusat Kegiatan Home Industri

Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi. Karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan perusahaan mereka.

Home Industri sebagai Alternatif Penghasilan bagi Keluarga

Bertambahnya jumlah keluarga tentu saja akan menambah jumlah kebutuhan dalam memenuhi keperluan anggota keluarga itu sendiri semakin meningkat. Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan terpenuhi jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan keluarga untuk menutupi kebutuhan tersebut. Home industri yang pada umumnya berawal dari usaha yang turun menurun pada akhirnya ini meluas secara otomatis, dapat bermanfaat sebagai mata pencaharian bagi orang-orang di kampung sekitarnya. Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak begitu menyita waktu, sehingga memungkinkan pelaku usaha membagi waktunya untuk keluarga dan pekerjaan tetap yang diembannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan dimana titik pengambilan data penelitian tentang program peningkatan keterampilan di, Kantor Walikota, Kantor Dinas Perindustrian, Kantor Dinas Koperasi UMKM, Kantor Dinas Sosial, Kantor Perusda, Tempat-tempat Home Industri. Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Teknik

Pengambilan data dengan observasi dan wawancara dan dokumen dan arsip.

Informan pada penelitian ini adalah : Walikota Palopo, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Koperasi UMKM, Kepala Bidang Dinas Sosial, Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palopo dan Pelaku Home Industri.

SIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Pengembangan Keterampilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan yang telah dilakukan. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha kepada masyarakat, memberikan pelatihan secara kreatif dan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal serta sarana dan prasarana pemasaran seperti internet perlu dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Medan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sehingga usaha yang dilakukan dapat optimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase %
2015	152573	15 300	10,22
2016	156603	14 900	9,47
2017	160819	15 500	9,57
2018	164903	14 590	8,80
2019	168.894	14.510	8,58

Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Medan periode Tahun 2015-2019, dengan

memperhatikan serta menyimak secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Medan boleh dikatakan hampir tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan membandingkan angka persentase penduduk miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada Tahun 2015 dan tahun 2019, boleh dikatakan bahwa angka tersebut meunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 2015 menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2019.

Tabel 2. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Medan tahun 2019

Jenis Bahan Makanan	Rata- rata Konsumsi	
	Satuan	Banyaknya
Beras/ beras ketan	Kg	1,697
Jagung basah dengan kulit	Kg	0,022
Jagung pipilan/ beras jagung	Kg	0,002
Ketela pohon/ singkong	Kg	0,016
Ketela rambat/ ubi	Kg	0,015
Ikan dan udang segar	Kg	0,724
Ikan dan udang diawetkan	Ons/0.1 Kg	0,210
Daging sapi	Kg	0,008
Daging ayam ras/ kampung	Kg	0,053
Telur ayam ras/ kampung	Butir/Unit	1,938
Telur itik/ manila	Butir/Unit	0,147
Susu kental manis	397 Grams	0,104
Susu bubuk bayi	Kg	0,031
Bawang merah	Ons/0.1 Kg	0,322
Bawang putih	Ons/0.1 Kg	0,212
Cabe merah	Kg	0,005
Cabe rawit	Kg	0,042
Tahu	Kg	0,063
Tempe	Kg	0,082
Minyak kelapa/ goreng	Liter	0,164
Kelapa	Butir/Unit	0,057
Gula pasir	Ons/0.1 Kg	1,293
Gula merah	Ons/0.1 Kg	0,077

Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Medan 2019

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Peningkatan Keterampilan Di Kota Medan

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kota Medan dimana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu (miskin). melalui program unggulan yang di canangkan oleh pemerintah kota yakni Kegiatan Home Industri.

Home Industri (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

Dengan adanya Dinas Perindustrian di Kota Medan, maka peranan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan masyarakat miskin semakin nyata dan terlihat. Peranan Dinas Perindustrian tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada pelaku usaha agar semakin giat mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah Bapak Drs. M. Amin Rambe bahwa : “Pemerintah dalam hal ini dinas perindustrian telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin yang kemudian dibina dan diberi keterampilan serta motivasi dengan cara memberikan bantuan peralatan dan terus meng follow up kegiatan-kegiatan agar mampu mengembangkan usahanya dan menciptakan produk-produk baru” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019).

Sejalan dengan pendapat Ibu Suharni selaku Ketua Kelompok di Kec. Medan Tuntungan

mengungkapkan bahwa, “Peranan Pemerintah Daerah sangat membantu dalam usaha saya. Awalnya kami dilatih dan dibina secara berkelompok, setelah berkelompok kita berusaha memproduksi tortilla (keripik) yang bahan bakunya dari ubi kayu, jagung dan rumput laut. (wawancara pada tanggal 8 juni 2019).

Tak hanya dalam bentuk pelatihan dan bantuan peralatan, teknis administrasi perizinan yang dilakukan pemerintah daerah diberi kemudahan dalam mengurusnya, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah Bapak Drs. M. Amin Rambe bahwa : “izin usaha bagi pelaku usaha dimudahkan tanpa biaya sedikitpun atau secara gratis” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2019).

Pemerintah Daerah Kota Medan memberikan bantuan cuma-cuma hanya kepada peserta program saja. Dengan kuantitas peserta program di Kota Medan menunjukkan kreatifitas masyarakat yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didukung oleh potensi alam yang ada. Kuantitas tersebut menjadikan kontribusi peserta program terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai baik.

Selain itu, dengan adanya Program Peningkatan Keterampilan di Kota Medan dapat meningkatkan lapangan kerja, seperti yang disampaikan Ibu Suharni - , selaku Ketua Kelompok Khilan di kec. Medan Tuntungan: “kalau karyawannya adalah kebetulan Ibu Rumah Tangga yang berada di sekitar rumah yang rata-rata pekerjaannya jadi pemulung. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, kemudian Ibu Suharni mengajak bergabung di usahanya.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2019). Dampak-dampak sosial dari adanya kontribusi Program tersebut di atas tidak terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Secara teknis, pemberdayaan dapat dilakukan dengan melakukan penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha.

Peran Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan Iklim Usaha

Pendanaan

Pemerintah Kota Medan menggunakan dana APBD untuk mengadakan program para peserta dalam dua gelombang yang dimana dalam satu gelombang terdiri dari 100 Orang dan dalam satu kelompok terdiri

dari 10 orang, masing masing peserta mendapatkan 3.800.000 / orang selama 10 hari, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang dalam dua gelombang maka jumlah dana yang di keluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam dua gelombang sebanyak 760.000.000.

Namun pemberian dana hanya pada proses pelatihan setelah itu tidak ada bantuan dana melainkan bantuan peralatan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah Bapak Drs. M. Amin Rambe: “Bantuan dana hanya pada saat memberangkatkan peserta untuk dilatih tetapi bantuan peralatan masih ada hanya saja bantuan dana tidak ada lagi”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Kemitraan

Peranan Pemerintah daerah sangat penting dalam proses memitirakan pelaku usaha. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi UMKM, Bapak Muhammad Azhar Lubis, bahwa :

“Peranan pemerintah daerah dalam hal ini dinas koperasi UMKM memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan administrasi “ (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019). Adapun dari teknis pola kemitraanya Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Koperasi UMKM, Bapak Muhammad Azhar Lubis mengungkapkan : “Pemerintah daerah dalam mengkordinasi kemitraan seperti misalnya pada saat ada pameran, Dinas Koperasi UMKM mencari mitra untuk para pelaku program, kalau ada yang berminat kita yang memfasilitasi mereka. Contoh pengurusan Administrasi antara pelaku program terhadap lembaga menjalin kemitraan dengan pelaku program. ada mitra yang mau mengambil/membeli produksinya, kita memfasilitasinya dengan mempertemukan mereka, Biasa ada juga yang langsung mencari mitra sendiri tidak melalui Dinas Koperasi UMKM.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019).

Perizinan Usaha

Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam urusan perizinan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah Bapak Drs. M. Amin Rambe bahwa : “Dalam proses perizinan bagi para pelaku program pemerintah sendiri memberikan kemudahan dan secara gratis, dalam hal ini dinas perindustrian sendiri mengeluarkan surat rekomendasi usaha bagi pelaku program yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu satu Pintu untuk dikeluarkannya surat izin usaha industri (SIUI).” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Sejalan dengan pendapat di atas, Hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati kende selaku ketua kelompok Kec.Medan Kota, bahwa dalam pengalamannya mengurus surat izin usaha sangat mudah dan pembiayaannya gratis.

“Perizinan usaha lancar, prosesnya kalau mau bikin surat izin usaha itu dimudahkan dan biayanya pun gratis tidak di bayar.” (Wawancara pada tanggal 9 Juni 2019).

Produksi dan Pengolahan

Pemberian bantuan peralatan diberikan melalui kelompok. Pemerintah daerah tidak memberikan bantuan pada usaha perorangan. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah Bapak Drs. M. Amin Rambe bahwa, “kita beri bantuan peralatan, Itu sudah banyak terlaksana. Tapi itu bukan diberi secara perorangan tapi melalui kelompok. Namun harus membuat permohonan. Kelompok itu, maksudnya terdiri dari beberapa orang di dalamnya, dan mempunyai badan pengurus.” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara ibu suharni selaku ketua kelompok di kec. Medan Tuntungan bahwa : “kalau untuk standarisasi kami memberi bantuan sertifikat halal untuk produk Khilan ada dua produk yang sudah di beri sertifikat halal yaitu tortilla jagung dan rumput laut semuanya di berikan secara cuma-cuma gratis.” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Blanchard, Ken.*et. al.* (2004).*Pemberdayaa Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit.* Batam Centre: Interaksara.
- [2] Edi, Suharto. (2010).*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: Refika Aditama.
- [3] Hikmat, R. Harry. (2001).*Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama Press.
- [4] Labolo, Muhadam. (2014).*Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya.* Jakarta: Rajawali Pers.

- [5] Priyono, Onny dan Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).
- [6] Rasyid, Ryaas. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- [7] Sabarno, Hari. (2008). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Sufianto, Dadang. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- [10] Syaukani. *et. al.* (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Wuradji. (2009). *Metodologi Pengembangan masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- [12] Zubaedi. (2007). *Wacana Pengembangan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.